

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026 (*dalam proses pembuatan*)

NO	JUDUL	RAPAT TIM LEGISLASI/ TIM BAPEMPERDA DPRD	HARMONISASI (kanwilhukum)	PEMBAHASAN PANSUS DPRD	FASILITASI/ EVALUASI	PENETAPAN/ PENGUNDANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Inisiatif DPRD)	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Inisiatif DPRD)	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Inisiatif DPRD)	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	✓	✓	✓	✓	-
7.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	-	-	-	-	-
8.	Rencana Tata Ruang Wilayah	-	-	-	-	-
9.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-

10.	Pedoman Penyusunan Propemperda (Inisiatif DPRD)	✓	✓	-	-	-
11.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD (Inisiatif DPRD)	-	-	-	-	-

Mengetahui
Kepala Bagian Hukum Setda,



RONNI SETIAWAN, SH., M.A.P.
Pangkat Pembina, IV/a
Nip : 19840308 201101 1 001

RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026 *(dalam proses pembuatan)*

NO	JUDUL	RAPAT TIM LEGISLASI	HARMONISASI (kanwilhukum)	FASILITASI/EVALUASI	PENETAPAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah	✓	✓	✓	✓
2.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	✓	✓	✓	✓
3.	Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026	✓	✓	✓	✓
4.	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026	✓	✓	✓	✓
5.	Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2022-2027	✓	✓	-	-
6.	Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah	✓	DIKEMBALIKAN	-	-
7.	Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	✓	✓	✓	✓
8.	Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	✓	✓	✓	✓
9.	Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	✓	✓	✓	✓
10.	Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	✓	✓	✓	✓
11.	Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	✓	✓	✓	-

12.	Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	✓	✓	✓	✓
13.	Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	✓	✓	✓	✓
14.	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Daerah	✓	✓	✓	✓
15.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13.a Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026	✓	✓	✓	✓
16.	Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal	✓	DIKEMBALIKAN	-	-
17.	Pedoman Pengadaan Tenaga Alih Daya Melalui Pihak Penyedia Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah	✓	✓	✓	✓
18.	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	DIKEMBALIKAN	-	-	-
19.	Teknis Pemerian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas Bagi ASN Lingkup Pemerintah Daerah	-	-	-	✓
20.	Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja	✓	✓	-	-
21.	Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	DIKEMBALIKAN	-	-	-
22.	Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2027	✓	✓	✓	✓
23.	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Kegiatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat	✓	DIKEMBALIKAN	-	-
24.	Pengelolaan Masjid Agung	✓	✓	-	-
25.	Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah	✓	✓	✓	-

26.	Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029	✓	✓	✓	✓
27.	Perubahan atas Perbup Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	✓	✓	✓	✓
28.	Pengelolaan, Perlindungan, Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	-	-	-	-
29.	Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112	-	-	-	-
30.	Tata Cara Persidangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-
31.	Perubahan-Perbup Remunerasi RS NEMAL	-	-	-	✓
32.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027	✓	✓	✓	✓
33.	Perubahan Atas Perbup Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2026	✓	✓	✓	✓
34.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	✓	✓	✓	✓
35.	Penanggulangan Tuberkulosis	✓	DIKEMBALIKAN	-	-
36.	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029	✓	✓	✓	-
37.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	✓	✓	-	-
38.	Tata Cara Pengelolaan Dan Pemanfaatan Pendapatan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dua Pitue Yang Belum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	DIKEMBALIKAN	-	-	-
39.	Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	✓	-	-	-
40.	Wajib Belajar 1 (Satu) Tahun Pendidikan Prasekolah	DIKEMBALIKAN	-	-	-
41.	Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2027	✓	✓	-	-

42.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Investasi Di Daerah	DIKEMBALIKAN	-	-	-
-----	--	--------------	---	---	---

Mengetahui
Kepala Bagian Hukum Setda,



RONNI SETIAWAN, SH., M.A.P.

Pangkat: Pembina, IV/a

Nip : 19840308 201101 1 001